

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustri dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja yang dikategorikan sangat tinggi, hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik guna mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. LKIP DPMPTSPPTK 2021 diharapkan menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bukittinggi, Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Drs. NOVERDI
NIP. 19661116 198602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF
EXECUTIVE SUMMERY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (LKIP DPMPTSPPTK) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP DPMPTSPPTK merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKIP juga memuat capaian realisasi keuangan dan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja pada Tahun 2021. Serta memuat mengenai analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kegiatan atau program, analisa efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut: (1). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan, dengan target 90% dengan realisasi 79,64% (tingkat capaian 90,5%); (2). Meningkatnya peluang investasi dengan indikator kinerja Persentase peningkatan realisasi investasi, target 8% dengan realisasi 6,1% (tingkat capaian 87,14%); (3). Meningkatnya

kontribusi sektor industri pengolahan dengan indikator Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB, target 6% realisasi 5,03% (86,72%) dan (4). Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, target 4,93% dengan realisasi 6,14% (79%). Secara keseluruhan capaian kinerja berada pada kategori Tinggi.

Pada Tahun 2021 DPMPTSPPTK juga melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.516.606.337,- (90,63%) dari target sebesar Rp.570.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.7.176.761.890,- dengan realisasi sebesar Rp.6.047.201.033,-(84,26%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 13.852.597.661,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.989.706.728 (86,55%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp. 20.889.763.116,- dengan realisasi Rp.18.036.907.761 , - (86,34%). DPMPTSPPTK memiliki 13 (tiga belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran. Secara umum capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan berada pada kategori sangat tinggi bahkan mencapai 100%. Untuk realisasi fisik dan keuangan yang dibawah 100% pada umumnya merupakan bentuk efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan.

LKIP DPMPTSPPTK ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu perindustrian dan tenaga kerja. Dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola, penataan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, perbaikan perencanaan yang efektif dan efisien, pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat guna serta peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam berbagai pemecahan permasalahan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
EXECUTIVE SUMMERY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR GAMBAR	V
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi SKPD	3
1.3. Isu Strategis SKPD	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 11
2.1. Rencana Strategis SKPD	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021	24
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021	39
 BAB IV PENUTUP	 59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	59

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	13
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021	15
Tabel 2.4 Target Pendapatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021	20
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	24
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2021	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2020 dan Tahun 2021	25
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra	27
Tabel 3.5 Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021	29
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan dan Belanja DPMPTSPPTK Tahun 2021	35
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021	36

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriandan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi dibawah naungan Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang selanjutnya disebut LKIP DPMPTSPPTK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi maka perlu disusun laporan kinerja yang memuat capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel dalam LKIP DPMPTSPPTK. Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kota Bukittinggi khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Capaian kinerja pada penyusunan LKIP DPMPTSPPTK dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada satu tahun anggaran. Capaian kinerja juga diukur dengan membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan jangka menengah perangkat daerah.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah maka disusun LKIP DPMPTSPPTK. Dokumen ini juga merupakan instrumen untuk mengontrol peningkatan kinerja setiap perangkat daerah.

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai target oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2021. Selanjutnya diharapkan juga dapat mendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LKIP DPMPTSPPTK juga berguna untuk evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan yang bekarsinambungan dalam meningkatkan kinerja serta dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bagian dari pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Kota Bukittinggi menetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Adapun ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur Pelaksana tugas Walikota dibidang Pelayanan Perizinan / Non Perizinan di Daerah dengan sistem satu pintu .
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun

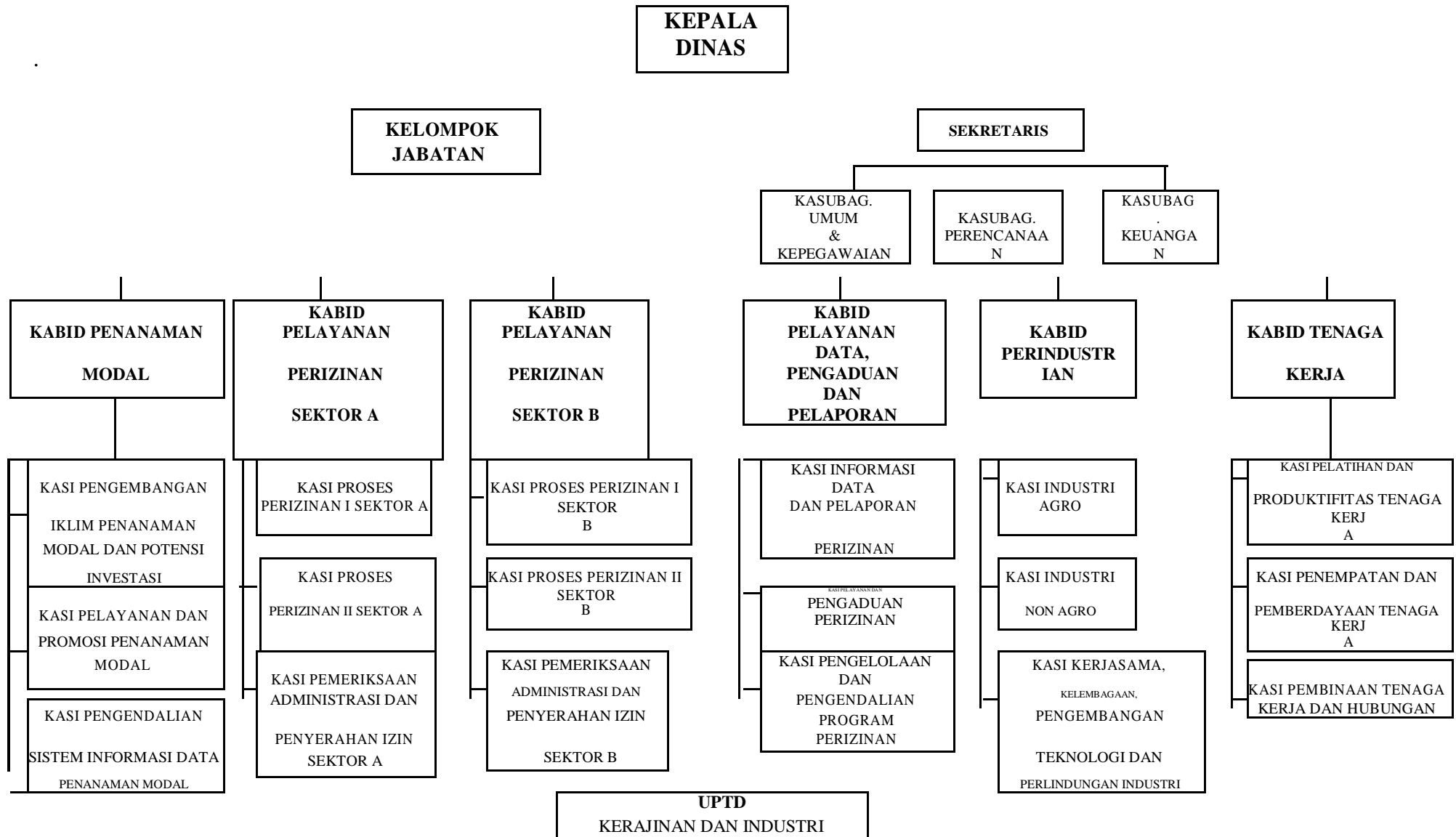
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Kasubag Umum
 2. Kasubag Keuangan
 3. Kasubag Perencanaan
- c. Kabid Penanaman Modal
 1. Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi
 2. Kasi Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal
 3. Kasi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal
- d. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor A
 1. Kasi Proses Perizinan I Sektor A
 2. Kasi Proses Perizinan II Sektor A
 3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A
- e. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B
 1. Kasi Proses Perizinan I Sektor B
 2. Kasi Proses Perizinan II Sektor B
 3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B
- f. Kabid Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan
 1. Kasi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan
 2. Kasi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan
 3. Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan
- g. Kabid Perindustrian
 1. Kasi Industri Agro
 2. Kasi Industri Non Agro
 3. Kasi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan industri

- h. Kabid Tenaga Kerja
 - 1. Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 2. Kasi Penempatan dan Pemberdayaan
Tenaga Kerja
 - 3. Kasi Pembinaan Tenaga Kerja dan
Hubungan Industrial
- i. Ka. UPTD Kerajinan Industri

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI



1.3. ISU STRATEGIS SKPD

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi; visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSPPTK serta metode analisis SWOT pada BAB II, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan dan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang menangani bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja sehingga dapat memainkan peran dalam menggerakkan sektor perekonomian.
2. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM (kompetensi teknis, konseptual maupun untuk berinteraksi secara aktif) dan kecukupan infrastruktur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global dengan membangun sikap kompetitif, handal, berwawasan, kreatif dan inovatif. Karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bukittinggi.
3. Perkembangan teknologi dan informasi dalam konsep tata pemerintahan dan pelayanan publik modern harus diikuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, yang pengembangannya terintegrasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan ketersediaan data perizinan yang up to date. Serta diharapkan dapat menjadikan teknologi dan informasi yang dikembangkan juga menjadi sarana dalam pelayanan pencari kerja, informasi pasar kerja, informasi produk industri kecil menengah dan informasi bentuk fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan yang dikelola DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata dan perdagangan diyakini akan memicu pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini juga mengharuskan

pemerintah sebagai perantara dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh sehingga kedua belah pihak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilandasi dengan azas kesamaan dalam hukum dan azas kesetaraan keadilan.

5. Perubahan struktur pasar dan selera masyarakat terhadap kualitas produk industri kecil menengah akan memberikan pengaruh terhadap daya saing produk IKM sehingga IKM harus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam produk dan strategi bisnis. Fasilitasi dan pembinaan dari DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi juga memegang peranan yang penting dalam mendukung perkembangan Industri Kecil Menengah.
6. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan industri kecil menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
7. Rendahnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Perluasan lapangan kerja tetap merupakan masalah yang cukup mendesak dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Disamping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Kota Bukittinggi ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah.
8. Peran pemerintah daerah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial di Kota Bukittinggi masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit dll.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab. I PENDAHULUAN

Mengemukakan uraian singkat tentang organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, struktur organisasi secara garis besar dan bagaimana antar bagian bersinergi mencapai sasaran dan tujuan, gambaran tentang apa yang diharapkan masyarakat dan Stakeholder atas keberadaan organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Berisikan Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Organisasi, Sasaran, Program, Kegiatan yang ingin dicapai dan indikator serta target dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam anggaran atau anggaran yang tersedia untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

Bab IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi dalam pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS SKPD

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menuangkan rencana pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Kemudian pada tingkat perangkat daerah rencana pembangunan jangka menengah ini dijabarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dokumen perencanaan strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Bukittinggi pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 yaitu: “**Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**”, maka dirumuskanlah kerangka pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun dalam Renstra DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2016-2021. Misi pada RPJMD yang menaungi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah :

1. Misi 2 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan
2. Misi 4 yaitu Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih berdaya Guna.

Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, yang memuat

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan misi diatas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya nilai investasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peluang investasi
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
4. Meningkatnya kesempatan kerja.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Th Ke						Kondisi Akhir Renstra 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
2	Menurunnya nilai Investasi	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	2%	2%	3%	5%	7%	8%	8%
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5%	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	6%	6%
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,88 %	5,84%	5,70 %	5,50%	5%	4,93%	4,93%

b. Strategi dan Kebijakan

Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu misi 2 “Meningkatkan kinerja pemerintahan secara lebih profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan” dan misi 4 “Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi

- Visi :** : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa
- Misi 2 RPJMD :** Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai jiwa Kewirausahaan
- Misi 4 RPJMD :** Mengembangkan Sistem ekonomi Perkotaan secara lebih berdaya guna

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu	1. Menyediakan bangunan Gedung kantor yang lebih Representatif 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal
		2. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya aparatur penanaman modal dan perizinan	1. Mengikuti seminar, sosialisasi, bimtek dan pelatihan penanaman modal 2. Melakukan koordinasi dan sharing informasi dalam peningkatan pelayanan

- Visi :** : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa
- Misi 2 RPJMD :** : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai jiwa Kewirausahaan
- Misi 4 RPJMD :** : Mengembangkan Sistem ekonomi Perkotaan secara lebih berdaya guna

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal diberbagai sektor ekonomi	1. Melaksanakan promosi investasi dalam dan luar Negeri 2. Meningkatkan Kerjasama kelompok usaha besar dengan usaha kecil menengah 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan penanaman modal
		2. Menyediakan data dan informasi penanaman modal yang akurat	1. Menyediakan informasi dan kajian peluang investasi 2. Membuat rencana umum penanaman modal 3. Menyediakan data PMDN dan PMA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Meningkatnya kontribusi sektor industry pengolahan	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen industry kecil menengah dan produk yang berdaya saing	1. Meningkatkan kemampuan teknologi industry 2. Meningkatkan kapasitas iptek system industry 3. Meningkatkan pelatihan IKM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industry yang komprehensif 4. Penataan terhadap struktur industry 5. Fasilitasi bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI sertifikat halal dan standarisasi internasional dalam produksi
		Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan industry kecil menengah serta kelompok usaha Bersama dalam pengembangan sentra industry potensial	1. Meningkatkan jumlah komunitas dan kluster industry kecil dan menengah berbasis industry kreatif Mengikuti pengembangan sumberdaya aparatur bidang industry

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Menegakkan regulasi ketenagakerjaan dalam hubungan industrial yang sehat dan produktif	1. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama Lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan 2. Peningkatan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian Kerjasama 3. Pembinaan anggota pengurus serikat pekerja 4. Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja mengenai hubungan kerja 5. Pengintegrasian system informasi pasar kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan dan pencari kerja 6. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan ketenagakerjaan 7. Mengikuti pengembangan sumberdaya aparaturbidang Tenaga kerja
		2. Melakukan fasilitasi dan pembinaan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja 2. Pengembangan pola pendanaan pelatihan melalui koordinasi pemerintahan daerah dengan Lembaga pelatihan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala DPMPTSPPTK dengan Walikota Bukittinggi. Dalam penyusunannya perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Berikut ini Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	6%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	4,93%

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam intern Dinas disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait (terlampir). Capaian target pada Perjanjian Kinerja di atas juga didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2021 melaksanakan 11 (sebelas) program 18 (delapan belas) kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Dinas PMPTSPPTK
 1. Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1. a. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 2.1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.a. Sub kegiatan Pelayanan Antar Kerja
 3. Program Hubungan Industrial
 - 3.1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.a. Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.b. Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4.1.a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4.2.a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.3.a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.3.b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 4.3.c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.3.d Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 4.3.e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.4.a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 4.4.b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 4.4.c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4.4.d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 5.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.a Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 6. Program Promosi Penanaman Modal
 - 6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.a Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 6.1.b Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota
- 7. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 7.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.a Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

7.1.b Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

7.1.b Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

8.1.Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

8.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

8.1.b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

9. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

9.1.Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9.1.a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis system pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik

10.Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

10.1.Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

10.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri

10.1.b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

10.2.Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

10.1.a. Sub Kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS

- Program dan Kegiatan Pada Dinas UPTD Kerajinan Industri

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 .Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1.a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

2.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

2.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Tabel 2.4
Target Pendapatan Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD (Rp)	APBD P (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	80.408.600	70.000.000	(1,8%)
	Retribusi IMB	500.000.000	500.000.000	(0)
	TOTAL PENDAPATAN	580.408.600	570.000.000	(1,79)
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	7.176.761.890	7.037.165.455	(1,95)
	Belanja Langsung	15.042.672.414	13.852.597.661	(12,94)
	TOTAL BELANJA	22.219.434.304	20.889.763.116	(5,98)

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 memiliki target penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.580.408.600,- dan penyesuaian pada perubahan anggaran sebagai dampak Covid-19 menjadi Rp.570.000.000,-.
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 memiliki Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 7.176.761.890,- dan mengalami pengurangan sebesar 1,95% menjadi Rp.7.037.165.455,- pada APBD Perubahan.
- Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 15.042.672.414,- mengalami efisiensi sebesar 12,94% menjadi Rp. 13.852.597.661,- pada APBD P Tahun 2021.
- Secara keseluruhan total Belanja pada APBD yaitu Rp. 22.219.434.304,- menjadi Rp. 20.889.763.116,- pada APBD P Tahun 2020.

Pada tahun 2021 DPMPTSPPTK melaksanakan 11 (sebelas) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Berikut dapat dijabarkan program dan kegiatan yang mendukung kegiatan internal atau operasional kantor DPMPTSPPTK dan program kegiatan yang mendukung capaian target sasaran DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

- a. Anggaran untuk mendukung pelayanan internal dianggarkan dengan rincian menurut kelompok belanja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 17.678.377.105,-
2	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (pada UPTD)	Rp. 2.357.600,-

- b. Anggaran yang mendukung sasaran 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.080.108.368,-
2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Rp. 78.420.000,-

- c. Anggaran yang mendukung sasaran 2 “Meningkatnya peluang investasi” yaitu :

No	Program	Anggaran
1	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Rp. 133.977.450,-
2	Program promosi penanaman modal	Rp. 153.749.000,-
3	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 384.856.673,-

- d. Anggaran yang mendukung sasaran 3 “Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program perencanaan pembangunan Industri	Rp. 213.443.804,-
	Program perencanaan pembangunan Industri (Pada UPTD)	Rp. 462.460.766,-
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0

- e. Anggaran yang mendukung sasaran 4 “Meningkatnya kesempatan kerja” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 581.233.850,-
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 42.878.500,-
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 77.900.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban kinerja atas target- target kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi dari suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi
	Kinerja	Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berikut capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**
Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	90%	82,93%	92%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	8%	6,1%	76%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sector Industry pengolahan pada PDRB	6%	5,03%	84%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5%	7,15%	69%

- a. Hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK pada tahun 2021 yaitu 82,93% dari target yang ditetapkan 90 %. Dengan tingkat capaian 92% Ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan kinerja unit pelayanan memberikan kinerja baik. Adapun masing-masing ruang lingkup pelayanan yakni persyaratan pelayanan kategori kurang baik; prosedur pelayanan kategori kurang baik; waktu pelayanan pada kategori baik; biaya/tarif pelayanan kategori baik; produk layanan kategori kurang baik; kompetensi pelaksana pelayanan kategori kurang baik; perilaku pelaksana kategori baik; penanganan pengaduan kategori sangat baik dan sarana prasarana kategori baik.

Beberapa kategori yang kurang baik disebabkan DPMPTSPPTK masih beroperasi pada kantor sementara sehingga pelayanan penanaman modal PTSP tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

- b. Pada tahun 2021 capaian persentase peningkatan realisasi investasi sebesar 6,1 persen dengan target yang ditetapkan 8%, dengan tingkat capaian 76%. Belum tercapainya target ini disebabkan kondisi perekonomian Kota Bukittinggi yang menurun akibat dampak dari Covid-19. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.
- c. Berdasarkan data BPS pada PDRB ADHB Tahun 2021, diperoleh realisasi dari kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 5,03 persen dengan target 6 persen, sehingga tingkat capaiannya hanya 84%. Capaian target ini masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini masih disebabkan oleh kebijakan PSBB dari pemerintah untuk pencegahan Covid-19, sehingga industri pengolahan sebagai salah satu sektor penunjang pariwisata sangat berpengaruh terhadap perkembangan aktifitas usahanya.
- d. Berdasarkan definisi bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar 7,15 persen, sedangkan target yang ditetapkan 4,93%. Dapat dilihat bahwa TPT Kota Bukittinggi masih tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Terbatasnya aktifitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19, memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan yang membatasi usaha dan operasionalnya. Pembatasan operasional ini akan mempengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap pekerja, sehingga permasalahan-permasalahan hubungan industrial tidak dapat dihindari, seperti pemutusan hubungan kerja.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indikator sasaran untuk tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
DPMPTSPPTK Tahun 2020 dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2020					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	79,64%	90,5%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,1%	87,14%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sector industri pengolahan pada PDRB	5,8%	5,03%	86,72%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	5%	6,14%	79%
2021					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90%	82,93%	92%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	6,10%	76%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sector industri pengolahan pada PDRB	6%	5,03%	84%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	7,15%	69%

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan setiap tahun pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebagai bentuk penilaian kinerja dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Pada Tahun 2020 IKM Pelayanan Perizinan sebesar 79,64% dan tahun 2021 sebesar 82,93% terjadi perbaikan sebesar 3,29%. Masih rendahnya capaian ini disebabkan operasional yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan pada Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi karena masih dalam tahapan pembangunan, sehingga sarana prasarana pelayanan belum maksimal. Diharapkan dengan dimulainya operasional MPP Kota Bukittinggi pada tahun 2022 kualitas pelayanan penanaman modal PTSP dapat semakin meningkat.
- b. Persentase peningkatan realisasi investasi belum mengalami peningkatan, untuk tahun 2020 tercapai 6,1% dari target 7 %. Sedangkan tahun 2021 yang ditarget 8% terealisasi 6,1 %. Kondisi ini disebabkan oleh dampak dari beberapa kebijakan pemerintah dalam menghambat penyebaran Covid-19, seperti adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga berkurangnya investor dalam melakukan investasi di Kota Bukittinggi.
- c. Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 yaitu 5,19% dibawah target yaitu 6%, dengan tingkat capaian indikator sebesar 84%. Tetapi kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ini lebih besar pada tahun 2020 yaitu 5,03% dengan target 5,8% dengan tingkat capai sebesar 86,72%.
- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2020 target TPT sebesar 5% dan realisasi 6,14% yang masih berada dibawah target. Untuk tahun 2021 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 4,93% dan terealisasi 7,15%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 5.274 dengan rincian pengangguran laki-laki 3.250 dan perempuan 2.024.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis organisasi yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 telah memuat target tahunan indikator kinerja DPMPTSPPTK. Target tahunan indikator kinerja disusun dalam Perjanjian Kinerja tahunan, yang diimplementasikan dalam Renja DPMPTSPPTK yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai target pada tahun berjalan. Berikut dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target akhir pada Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 pada table berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90%	82,93%	92%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	6,10%	76%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	6%	5,03%	84%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	4,93%	7,15%	69%

- a. Target akhir Renstra untuk Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan tahun 2021 sebesar 90%, jika dibandingkan dengan IKM tahun 2020 yaitu sebesar 79,64%, masih terdapat selisih sebesar 10,36%. Selisih ini menjadi tugas bagi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. Diharapkan dengan

- b. meningkatkan jumlah pelayanan perizinan yang dilayani secara online (melalui OSS, Si Cantik dan SIM BG) dan mulai beroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi akan dapat meningkatkan nilai IKM pelayanan perizinan ini sesuai target akhir Renstra.
- b. Persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2021 yang ditarget 8% terealisasi 6,1%. Nilai ini berada dibawah target yang ditetapkan pada akhir Renstra sebesar 8%. Sehingga masih diperlukan promosi penanaman modal dan pembinaan dunia usaha sehingga nilai investasi Kota Bukittinggi terus meningkat.
- c. Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ditarget pada akhir Renstra sebesar 6% artinya diharapkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor ini dapat memberikan kontribusi sebesar 5,03% untuk membentuk PDRB ADHB Kota Bukittinggi yang terdiri atas 17 sektor lapangan usaha. Kontribusi ini sangat berpengaruh terhadap pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitasnya.
- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada akhir Renstra tahun 2021 ditargetkan sebesar 4,93% dengan realisasi hanya 7,15%, Sedangkan untuk tahun 2020 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 5% dengan realisasi 6,14%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 5.247 dengan rincian pengangguran laki-laki 3.250 dan perempuan 2.020. Realisasi tahun 2021 ini masih jauh jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Meskipun DPMPTSPPTK telah mempersiapkan berbagai bentuk pelayanan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja dan pembinaan perusahaan dengan harapan dapat menekan angka pengangguran di Kota Bukittinggi, namun dengan terjadinya Pandemi Covis 19 dan tingginya angka migrasi pencari kerja ke Kota Bukittinggi target yang ditetapkan belum dapat dicapai pada Tahun 2021 ini.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut

Penyebab keberhasilan:

- Optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2021 dengan penyerapan anggaran mencapai 86% dengan rincian 86% untuk belanja tidak langsung dan 87% untuk Belanja Langsung;
- Adanya komitmen semua pejabat struktural dan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- Tahun 2021 hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggunakan aplikasi berada pada kategori Baik;
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia;
- Menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyebab kegagalan:

- Ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang masih terbatas. Berdasarkan Anjab seharusnya berjumlah 80 orang, sedangkan saat ini hanya tersedia 54 orang
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware dan soft ware pendukung operasional dan pelayanan.
- Adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sehingga tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSPPTK Tahun 2021.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek dan diikuti diklat yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan

- b. Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Melakukan percepatan dalam penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan lebih maksimal dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang tersedia

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Selama Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.
- c. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- d. Melakukan cascading kinerja dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2021, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021. Dapat dilihat pada table berikut kegiatan yang dieliminasi sesuai cascading kinerja DPMPTSPPTK :

Tabel 3.5
Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Efisiensi
Program Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	57.441.680
Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit Kompetensi	57.441.680
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	57.441.680
Program Penempatan Tenaga Kerja	5.053.750
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	5.053.750
Pelayanan Antar Kerja	5.053.750
Program Hubungan Industrial	19.393.048
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	19.393.048
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.915.297
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	16.477.751
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.527.557.934
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.463.450
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.463.450
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	989.964.422
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	989.964.422
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.430.973
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.430.973
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.687.230
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	230.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.734.889
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	658.750
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.380.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.520.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.162.891

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Efisiensi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565.313.621
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	565.313.621
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.471.038
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	890.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.580.838
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.227.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.881.001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.931.509
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.125.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.289.690
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.330.550
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	2.330.550
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	2.330.550
Program Promosi Penanaman Modal	1.012.500
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.012.500
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1.012.500
Program Pelayanan Penanaman Modal	95.776.239
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	95.776.239
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	82.573.344
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	9.014.438
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4.188.457

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Efisiensi
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	79.144.878
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	79.144.878
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	78.347.289
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	797.589
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	475.395
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	475.395
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	475.395
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (UPTD)	711.600
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.600
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD)	711.600
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	63.957.781
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	63.957.781
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6.262.934
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (UPTD)	46.171.747
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11.523.100
TOTAL	2.852.855.355

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

- a. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:
 - Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Program	Indikator	% Fisik	% Keuangan
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	100%	90%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	100%	88%
3	Program Hubungan Industrial	persentase penurunan kasus hubungan industrial	100%	75%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip SKPD	BB	86%
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemudahan berusaha	100%	98%
6	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi hijau	100%	99%
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan secara online	100%	91%
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	100%	79%
9	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data informasi perizinan secara online	100%	99%
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan Pembinaan	100%	91%
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan		

Dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021 jika dilihat dari realisasi fisik pada umumnya berada pada kategori sangat baik bahkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi keuangan berada dibawah 100%, kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1) Program Pelatihan kerja dan Produktifitas

Program ini bertujuan untuk memenuhi persentase peningkatan wirausaha mandiri, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.581.233.850,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.523.792.170,- (90%).

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk peningkatan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.42.878.500,- dengan realisasi sebesar Rp.37.824.750,- dan realisasi mencapai angka 88%.

- 3) Program Hubungan Industrial
Program ini untuk menurunkan kasus hubungan industrial, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp.77.900.000,- dengan realisasi Rp.58.506.952,- dan tingkat capaian 75%.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai Sakip SKPD, terdiri atas 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp.17.678.377.105,- dengan realisasi Rp.15.150.819.171,- dan tingkat capaian 86%.
- 5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase kemudahan berusaha, dengan alokasi anggaran program Rp. 133.977.450,- dengan realisasi Rp. 131.313.600 dan tingkat pencapaian 98%.
- 6) Program Promosi Penanaman Modal
Program ini bertujuan mineingkatkan Nilai Realisasi Investasi Hijau dengan alokasi anggaran Rp. 153.749.000,- dengan realisasi Rp. 152.736.500,- dengan tingkat pencapaian 99%.
- 7) Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase kemudahan berusaha, dengan alokasi anggaran program Rp. 133.977.450,- dengan realisasi Rp. 131.313.600 dan tingkat pencapaian 98%.
- 8) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan, dengan alokasi anggaran Rp. 384.856.673,- dengan realisasi Rp. 305.711.795 dan tingkat pencapaian 79%.
- 9) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentasi data informasi perizinan secara online dengan alokasi anggaran Rp. 78.420.000 dengan realisasi Rp. 77.944.605 dengan tingkat pencapaian 99%.
- 10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan dengan alokasi anggaran Rp. 675.904.570,- dengan realisasi Rp. 611.946.789,- dan tingkat pencapaian 91%.
- 11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase IKM

b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Kegiatan	Fisik	Keuangan
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	100%	90%
2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah laporan pencari kerja	100%	88%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	100%	92%
3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100%	58%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100%	92%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	100%	92%
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	100%	97%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	100%	96%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	100%	90%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	100%	97%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	100%	83%
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	100%	77%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan lembur Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	100%	83%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Kegiatan	Fisik	Keuangan
13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung kantor	100%	91%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	100%	76%
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jumlah rekening yang dibayar	100%	55%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 yang terpeliharaan	100%	61%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%	70%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	100%	45%
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah jasa cleaning service	100%	96%
20	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah buku studi kelayakan investasi	100%	98%
21	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi investasi yang diikuti	100%	99%
22	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase izin yang diproses	100%	92%
23	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan	100%	77%
24	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100%	77%
25	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan penanaman modal Jumlah pengawasan penanaman modal	100%	76%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Kegiatan	Fisik	Keuangan
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100%	99%
27	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	100%	99%
28	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang dibeli	100%	70%
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	100%	93%
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihatkan Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	100%	90%
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pameran kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	100%	91%
32	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data industri	-	-

Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa 32 (tiga puluh dua) kegiatan semuanya mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, meskipun ada beberapa capaian fisik yang masih kurang 100%. Untuk capaian kinerja keuangan yang kurang 100% pada umumnya merupakan sisa lebih pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya efisiensi dalam penyerapan anggaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki target dan realisasi pendapatan dan belanja seperti pada table berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan
Belanja Pada Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	70.343.600	79.122.500	
	Retribusi IMB	443.325.681	437.483.837	
	TOTAL PENDAPATAN	513.669.281	516.606.337	
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	7.037.165.455	6.047.201.033	87%
	Belanja Langsung	13.852.597.661	11.989.706.728	86%
	TOTAL BELANJA	20.889.763.116	18.036.907.761	86%

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.516.606.337,- (91%) dari target sebesar Rp.570.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 7,037165.455- dengan realisasi sebesar Rp.6.047.201.033,- (86%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.13.852.597.661,- dengan realisasi sebesar Rp.11.989.706.728 (87%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp.20.889.763.116,- dengan realisasi Rp.18.036.907.761 (86%). Pada tahun 2021 DPMPTSPPTK telah melaksanakan 11 (sebelas) program dan 18 Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Realisasi anggaran dan fisik secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN					570,000,000.00	516,606,337.00	91%	
	Retribusi pemakaian Kekayaan Bersih					70,000,000.00	79,122,500.00	113%	
	Sewa Pemakaian Alat Berat/ Mesin					70,000,000.00	79,122,500.00	113%	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					500,000,000	437,483,837.00	87%	
	-Retribusi IMB					500,000,000	437,483,837.00	87%	
	BELANJA					20,889.763.116	18.036.907.761	86%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					7,037,165,455	6,047,201,033	87%	
	Belanja Pegawai					7,037,165,455	6,047,201,033	87%	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan					4,101,241,867.00	3,701,961,501.00	77.85%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS					2,868,303,158.00	2,301,272,782.00	94.39%	
	- insentif pemungutan retribusi daerah					67,620,430.00	43,966,750.00	63.02%	
	BELANJA LANGSUNG					13,852.597.661.	11,989,706,728.	87%	
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar								
	Urusan pemerintahan Bidang Tenaga kerja								
	Program Pelatihan Unit Kompetensi								
	Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi					581,233,850	523,792,170.00	90%	
1	Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta design grafis, jumlah peserta pelatihan kewirausahaan, jumlah peserta pelatihan menjahit, jumlah peserta pelatihan tata boga	16 orang 32 orang 32 orang 16 orang	16 orang 32 orang 32 orang 16 orang	100%	581,233,850	523,792,170.00	90%	
	Program Penempatan Tenaga Kerja								
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota					42.878.500	37.824.750	88%	
2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah laporan pencari kerja	12 laporan	12 laporan	100%	42.878.500	37.824.750	88%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Hubungan Industrial								
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota					77.900.000	58.506.952	75%	
3	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	10 perusahaan	19 perusahaan	100%	38.450.000	35.534.703,00	92%	
4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100%	100%	100%	39.450.000	22.972.249,00	58%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.952.750	16.489.300	92%	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	17.952.750	16.489.300	92%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.037.165.455	6.047.201.033	86%	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	54 orang	54 orang	100%	7.037.165.455	6.047.201.033	86%	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					327.195.000	316.764.027,00	97%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	9 orang 12 bulan	9 orang 12 bulan	100%	327.195.000	316.764.027,00	97%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.235.525.100	1.985.837.870	89%	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	12 jenis	12 jenis	100%	6.134.000	5.904.000,00	96%	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	38 jenis	38 jenis	100%	1.939.848.000	1.738.113.111,00	90%	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jeni salat tulis yang dibeli	38 jenis	38 jenis	100%	23.443.100	22.784.350,00	97%	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	6 jenis 30032 lembar 125 buah	6 jenis 28032 lembar 100 buah	100%	20.230.000	16.849.400,00	83%	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minuman tamu	400 porsi			23.530.000	18.009.900,00	77%	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan lembur Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	640 porsi 90%	440 porsi 90%	100%	222.340.000	184.177.109,00	83%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.082.380.000	5.517.066.379	91%	
13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan Gedung kantor	1 unit	1 unit	100%	6.082.380.000	5.517.066.379,00	91%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.383.660.000	759.188.962	55%	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3.000 Jumlah materai 6.000	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah			3.660.000	2.769.800,00	76%	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jumlah rekening yang dibayar	12 bulan 4 rekening	12 bulan 4 rekening	100%	1.380.000.000	756.419.162,00	55%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					594.498.800	508.271.600	85%	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%	41.210.000	25.328.999,00	61%	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional dinas yang dipelihara	21 unit	21 unit	100%	178.931.400	124.999.891,00	70%	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5.660.000	2.535.000,00	45%	
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah jasa cleaning service	22 jenis 12 bulan	22 jenis 12 bulan	100%	368.697.400	355.407.710,00	96%	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								

REKAPITULASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITINGGI TAHUN 2021									
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota					133.977.450	131.646.900	98%	
19	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	1 dokumen 1 peta	1 dokumen 1 peta	100%	133.977.450	131.646.900,00	98%	
	Program Promosi Penanaman Modal								
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					153.749.000	152.736.500	99%	
20	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi investasi yang diikuti	1 event	1 event	100%	153.749.000	152.736.500,00	99%	
	Program Pelayanan Penanaman Modal					1.080.108.368	984.332.129	91%	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
21	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase izin yang diproses	3 Aplikasi 3700 izin 100%	3 Aplikasi 3700 izin 100%	100%	1.022.027.168	939.453.824,00	92%	
22	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	2 dokumen 1 laporan	2 dokumen 1 laporan	100%	39.936.650	30.922.212,00	77%	
23	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100%	100%	100%	18.144.550	13.956.093,00	77%	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					384.856.673	305.711.795	79%	
24	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan penanaman modal Jumlah pengawasan penanaman modal Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6 kali 12 kali 7 kali	6 kali 12 kali 7 kali	100%	326.122.000	247.774.711,00	76%	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	58.734.673	57.937.084,00	99%	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					78.420.000	77.944.605	99%	
26	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	3.000 berkas 48 laporan 100 persen	3.000 berkas 48 laporan 100 persen	100%	78.420.000	77.944.605,00	99%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.357.600	1.646.000	70%	
27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jeni salat kebersihan yang dibeli	12 jenis	12 jenis	100%	2.357.600	1.646.000,00	70%	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota					675.904.570	611.946.789	91%	
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM Jumlah peserta label halal	20 orang 7 lkm 30 orang	20 orang 7 lkm 30 orang	100 %	83.974.804	77.711.870,00	93%	
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industry yang dipelihara Jumlah Gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industry yang difasilitasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	100%	462.460.766	416.289.019,00	90%	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kain perca Jumlah peserta pelatihan merajut Jumlah pameran yang diikuti	50 orang 25 orang 2 pameran	50 orang 25 orang 2 pameran	100 %	129.469.000	117.945.900,00	91%	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional								
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota					0	0		
31	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					0	-		
	TOTAL					20.889.763.116	18.036.907.761	86%	

- 1) Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah peserta design grafis yang ditargetkan 16 orang, terealisasi 16 orang, jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang ditargetkan 32 orang terealisasi 32 orang, jumlah peserta pelatihan menjahit yang ditargetkan 32 orang terealisasi 32 orang dan jumlah peserta pelatihan tata boga yang ditargetkan 32 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang, untuk capaian kinerja terealisasi 100%, dan alokasi dana sebesar Rp.581.233.850,- terealisasi Rp.523.792.170,- dengan realisasi keuangan 90%.
- 2) Sub kegiatan pelayanan antar kerja. Indikator kinerja nya adalah Jumlah laporan pencari kerja, dengan target 12 laporan pencari kerja yang telah terealisasi seluruhnya sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja 100%, anggaran Rp. 42.878.500,- terealisasi Rp. 37.824.750,- dengan realisasi keuangan 88%
- 3) Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan, ditargetkan 10 perusahaan, terealisasi 19 perusahaan dengan anggaran Rp. 38.450.000 terealisasi Rp. 35.534.703,- sehingga kinerja keuangan 92%
- 4) Sub kegiatan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kinerja Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani telah terealisasi 100%, dengan anggaran 39.450.000,- dapat direalisasikan Rp. 22.972.249,- dengan capaian kinerja keuangan 58%
- 5) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah, indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun, dengan target 3 dokumen telah terealisasi 100% sebanyak 3 dokumen dengan anggaran Rp. 17.952.750,- terealisasi Rp. 16.489.300,- sehingga kinerja keuangannya mencapai 92%
- 6) Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan ditargetkan sebanyak 57 orang telah direalisasikan 100%, dengan Anggaran Rp. 7.037.165.455,- telah direalisasikan Rp. 6.047.201.033,- kinerja keuangan 86%.

- 7) Sub kegiatan Pengamanan Barang milik daerah, dengan indikator kinerja jumlah jasa pengamanan kantor yang ditargetkan sebanyak 9 orang telah terealisasi 9 orang dan jumlah pelaksanaan pengamanan kantor yang ditargetkan selama 12 bulan telah dapat direalisasikan 12 bulan dengan jumlah anggaran Rp. 327.195.000,- telah direalisasikan Rp. 316.764.027,- dengan tingkat realisasi keuangan 97%
- 8) Sub kegiatan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor dengan indikator jenis peralatan listrik yang diadakan ditargetkan sebanyak 12 jenis telah tersedia sebanyak 12 jenis, dengan anggaran Rp. 23.443.100,- terealisasi Rp. 22.784.350,- dengan tingkat realisasi 96%
- 9) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan indikator jenis peralatan kantor yang diadakan ditargetkan sebanyak 38 jenis telah terealisasi sebanyak 38 jenis, dengan anggaran Rp. 1.939.848.000,- terealisasi Rp. 1.738.113.111,- dengan capaian kinerja 90%
- 10) Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, dengan indikator jenis alat tulis yang dibeli ditargetkan 38 jenis telah terealisasi seluruhnya 38 jenis, dengan anggaran Rp. 23.443.100,- telah terealisasi Rp. 22.784.350,- sehingga realisasi keuangan 97%
- 11) Sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan, indikator kinerja jenis barang yang dicetak ditargetkan 6 jenis, terealisasi 6 jenis. Jumlah dokumen yang digandakan ditargetkan sebanyak 30.032 lembar telah terealisasi 29.112 lembar, jumlah dokumen yang dijilid ditargetkan sebanyak 125 buah telah terealisasi 125 buah
- 12) Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu, indikator kinerja jumlah penyediaan makan dan minum tamu ditargetkan sebanyak 400 porsi telah terealisasi sebanyak 259 porsi, dengan anggaran 23.530.000,- terealisasi Rp. 18.009.900,- dengan tingkat realisasi keuangan 77%
- 13) Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat dan lembur yang ditargetkan sebanyak 640 porsi telah terealisasi 440 porsi, dan persentase pemenuhan rapat yang dihadiri ditargetkan 90% telah terealisasi seluruhnya, dengan Anggaran 222.340.000,- terealisasi Rp. 184.177.109,- sehingga tingkat kinerja keuangan 83%

- 14) Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah pembangunan Gedung kantor yang ditargetkan sebanyak 1 unit telah terealisasi 100%, anggaran Rp. 6.082.380.000,- terealisasi Rp. 5.517.066.379,- dengan persentase keuangan 91%
- 15) Sub kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat, dengan indikator Jasa pengiriman paket yang ditargetkan sebanyak 12 bulan telah terealisasi 100%, jumlah buku cek ditargetkan 4 buah, jumlah materai 10.000 telah terealisasi seluruhnya
- 16) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik dengan indikator jumlah bulan pembayaran dan jumlah rekening yang dibayar, telah terealisasi sesuai dengan target yakni 12 bulan sebanyak 4 rekening, anggaran Rp. 1.380.000.000,- realisasi Rp. 756.419.162,-
- 17) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan eselon 2 yang terpelihara sebanyak 1 unit, dengan jumlah anggaran Rp. 41.210.000,- terealisasi Rp. Rp. 25.328.999,- dengan realisasi kinerja 61%.
- 18) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan operasional yang terpelihara sebanyak 21 unit, dengan jumlah anggaran Rp. 178.931.400,- terealisasi Rp. Rp. 124.999.891,- dengan realisasi kinerja 70%.
- 19) Sub kegiatan pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya, dengan indikator jasa perbaikan peralatan kantor telah terealisasi sebanyak target selama 12 bulan, dengan anggaran Rp. 5.660.000,- terealisasi Rp. 2.535.000,- sehingga realisasi kinerja keuangan adalah 45%.
- 20) Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor, dengan indikator jenis alat kebersihan yang diadakan, dan jumlah jasa cleaning servis telah terealisasi sebanyak target 22 jenis dan 12 bulan, dengan anggaran Rp. 368.697.400,- terealisasi Rp. 355.407.710,- sehingga realisasi kinerja keuangan adalah 96%.
- 21) Sub kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah buku studi kelayakan investasi dan jumlah peta potensi investasi telah terealisasi sesuai target 1 dokumen dan 1 peta, dengan anggaran Rp. 133.977.450,- terealisasi Rp. 131.646.900,- sehingga realisasi keuangan adalah 98%

- 22) Sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah promosi investasi yang diikuti telah terealisasi sesuai target 1 event, dengan anggaran Rp. 153.749.000,- terealisasi Rp. 152.736.500,- sehingga realisasi keuangan adalah 99%
- 23) Sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dengan indikator kinerja jumlah aplikasi yang dikelola, jumlah izin yang diterbitkan, persentase izin yang diproses, telah terealisasi sesuai target sebanyak 3 aplikasi, 2.370 izin dan 100%, dengan anggaran Rp. 1.022.027.168,- terealisasi Rp. 939.453.824,- sehingga realisasi keuangan adalah 92%
- 24) Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah dokumen aturan hukum perizinan, jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan telah terealisasi sesuai target sebanyak 2 dokumen dan 1 laporan, dengan anggaran Rp. 39.936.650,- terealisasi Rp. 30.922.212,- sehingga realisasi keuangan adalah 77%
- 25) Sub kegiatan Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator kinerja persentase pengaduan perizinan yang ditangani telah terealisasi sesuai target 100%, dengan anggaran Rp. 18.144.550,- terealisasi Rp. 13.956.093,- sehingga realisasi keuangan adalah 77%
- 26) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Jumlah pemantauan penanaman modal, pengawasan penanaman modal, dan sosialisasi yang dilaksanakan telah terealisasi sesuai target 6 kali, 12 kali dan 7 kali dengan anggaran Rp. 326.112.000,- terealisasi Rp. 247.774.711,- sehingga realisasi keuangan adalah 76%
- 27) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal, telah terealisasi sesuai target 1 dokumen dengan anggaran Rp. 58.734.673,- terealisasi Rp. 57.937.084,- sehingga realisasi keuangan adalah 99%

- 28) Sub kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan indikator kinerja jumlah berkas perizinan yang divalidasi, jumlah laporan data perizinan dan persentase informasi perizinan yang diterbitkan telah terealisasi sesuai target 2.556 berkas, 48 laporan dan 95% dengan anggaran Rp. 78.420.000,- terealisasi Rp. 77.944.605,- sehingga realisasi keuangan adalah 99%
- 29) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD) dengan indikator kinerja jenis alat kebersihan yang dibeli telah terealisasi sesuai target sebanyak 12 jenis dengan anggaran Rp. 2.357.600,- terealisasi Rp. 1.646.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 70%
- 30) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri dengan indikator kinerja Jumlah peserta pelatihan packing, jumlah sertifikasi halal ikm, dan jumlah peserta label halal telah terealisasi sesuai target sebanyak 20 orang, 7 IKM, dan 30 orang dengan anggaran Rp. 83.974.804,- terealisasi Rp. 77.711.870,- sehingga realisasi keuangan adalah 93%
- 31) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana industri dengan indikator kinerja jumlah alat kerajinan industry yang dipelihara, jumlah Gedung uptd yang dikelola, jumlah organisasi mitra industry yang difasilitasi telah terealisasi sesuai target sebanyak 1 unit, 1 unit dan 1 organisasi dengan anggaran Rp. 462.460.766,- terealisasi Rp. 416.289.019,- sehingga realisasi keuangan adalah 90%
- 32) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat dengan indikator kinerja jumlah peserta pelatihan kain perca, jumlah peserta pelatihan merajut, dan jumlah pameran yang diikuti telah terealisasi sesuai target sebanyak 50 orang, 25 orang, dan 1 pameran dengan anggaran Rp. 129.469.000,- terealisasi Rp. 117.945.900,- sehingga realisasi keuangan adalah 91%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan LKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai pengelola urusan penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam urusan penanaman modal bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan perindustrian dan pelayanan serta penempatan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.


Dengan memperhatikan capaian kinerja di Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mencapai 86% dengan predikat “Tinggi” dan untuk semua kegiatan sudah terealisasi sesuai kebutuhan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

4.2 SARAN

Dengan adanya Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolok ukur untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitas pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi;
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

Bukittinggi, Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Bukittinggi



Drs. NOVERDI
NIP. 19661116 198602 1 001